



LAPORAN KINERJA

TAHUN ANGGARAN
2022

**KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN
NEGARA DAN LELANG BEKASI**

**DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA**

Jln. Sersan Aswan No. 8 D, RT002/RW009, Margahayu, Kota Bekasi, Jawa Barat

Telp. (021) 8808888 – Faks (021) 8803832

www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-bekasi

@kpknl_bekasi

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Bab I Pendahuluan	1
A. Tugas, Fungsi, Visi Dan Misi KPKNL Bekasi	3
B. Permasalahan Utama (<i>Strategic Issue</i>) Pada KPKNL Bekasi.....	5
Bab II Perencanaan Kinerja	10
Bab III Akuntabilitas Kinerja	13
A. Capaian Kinerja Organisasi	12
B. Analisis Kinerja	15
C. Hal Yang Mendukung, Serta Kendala Pencapaian Rencana/Target dan Langkah-Langkah Yang Telah Diambil Dalam Mengatasi Kendala	24
D. Realisasi Anggaran	27
E. Inovasi Dan Prestasi Kinerja	27
Bab IV Penutup	32

BAB I

PENDAHULUAN

Pandemi *Covid-19* telah melanda Indonesia selama hampir 3 tahun sejak tahun 2020. Indonesia dituntut untuk menghadapi hal yang selama ini tidak pernah terbayangkan baik dari segi dampak utamanya terhadap kesehatan, maupun dampak tambahannya terhadap sektor perekonomian. Kemampuan Indonesia dalam menghadapi pandemi *Covid-19* dimulai dengan relokasi anggaran besar-besaran secara *prudent* dan akuntabel ke sektor kesehatan sebagai komitmen untuk menghindari dampak kesehatan yang jauh lebih besar dan juga sebagai fondasi untuk pemulihan ekonomi. Postur APBN yang semula ditujukan untuk penyelenggaraan negara yang sifatnya tidak langsung dirasakan oleh masyarakat, kini berubah menjadi *safety net* yang begitu dirasakan oleh masyarakat luas khususnya yang terdampak langsung maupun dampak tambahan oleh pandemi *Covid-19*. Kementerian Keuangan selaku Kementerian yang membidangi urusan keuangan, memegang peranan penting untuk mengatur pola keuangan agar penyelenggaraan negara tetap terus berjalan ditengah pandemi *Covid-19*. Pandemi yang cukup meluluhlantakkan perekonomian menjadi contoh bahwa negara harus hadir sebagai pemberi jaminan atau pelindung untuk masyarakat luas. Tata kelola negara diuji untuk merubah paradigma atau cara pandang dalam tata Kelola pemerintahan dan budaya kerja aparatur negara sehingga lebih cepat tanggap dan melayani sebagai upaya untuk mengatasi pandemi *Covid-19* yang turut memberikan arah positif terhadap pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (*business process*), sumber daya manusia. Pembaharuan dan perubahan hanya dapat diwujudkan dengan melakukan langkah-langkah bertahap yang dilandasi tindakan-tindakan konkret dan realistis, serta melakukan revisi atas berbagai regulasi maupun kebijakan sesuai dengan kondisi yang terjadi.

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) sebagai bagian dari Kementerian Keuangan memiliki peran strategis dalam pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara dan lelang, khususnya terhadap pengelolaan aset negara. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bekasi sebagai salah satu dari instansi vertikal DJKN merupakan ujung tombak yang langsung berhubungan dengan masyarakat atau pengguna jasa (*stakeholder*), terus berupaya meningkatkan pelayanan dan kinerja secara sistematis dan berkesinambungan dengan memaksimalkan sumber daya yang ada. Penyelenggaraan pelayanan publik tidak semata-mata ditujukan pada pemenuhan hak-hak sipil warga negara dan pemenuhan kebutuhan dasarnya, akan tetapi juga dilakukan dengan optimal untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik secara sinergis dan komprehensif sehingga terwujud pelayanan terbaik dan sikap kerja yang berintegritas, profesional, akuntabel, transparan, dan memiliki karakteristik sesuai dengan tujuan reformasi birokrasi.

Salah satu langkah konkret yang dilakukan oleh KPKNL Bekasi dalam melakukan penyelenggaraan negara ditengah pandemi *Covid-19* adalah meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan secara konsisten dengan berpedoman pada standar pelayanan publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik

Indonesia Nomor 46/PMK.01/2021 tentang Pedoman Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Keuangan dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Perubahan tata kelola pemerintahan yang harus cepat tanggap dalam penyelenggaraan negara yang disesuaikan dengan kondisi turut menuntut untuk melakukan perubahan tata kelola keuangan negara dengan ditujukan untuk meningkatkan kualitas dalam pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan transparan. Perbaikan akuntabilitas dan transparansi keuangan negara merupakan bagian terpenting dari penegakan tata Kelola pemerintahan sehingga menjadi titik temu yang menggerakkan roda-roda perubahan tata kelola pemerintahan. KPKNL Bekasi sebagai bagian dari Kementerian Keuangan, menjadi salah satu pilar dalam mewujudkan perubahan besar terhadap tata kelola keuangan negara yang dicanangkan oleh Menteri Keuangan, dengan dilandasi oleh tiga paket undang-undang di bidang keuangan negara, yaitu:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; dan
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Salah satu peranan KPKNL dalam mewujudkan perubahan tata kelola keuangan negara tersebut diantaranya adalah mewujudkan nilai kekayaan negara (Barang Milik Negara) yang wajar dalam neraca pemerintah (Laporan Keuangan Pemerintah Pusat) melalui kegiatan inventarisasi dan penilaian Barang Milik Negara. Pandemi *Covid-19* disikapi dengan rasa bakti kepada negara untuk semakin memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat luas agar roda perekonomian yang semula terdampak oleh pandemi *Covid-19* kembali berputar.

Sebagai wujud dari keberhasilan KPKNL Bekasi dalam upaya meningkatkan pelayanan dan kinerja adalah terpilihnya KPKNL Bekasi sebagai unit yang diikutsertakan dalam beberapa kegiatan, antara lain:

1. Kantor berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) sejak tahun 2018.
2. Modul Aplikasi SIBELANG (Sistem Informasi Bendahara Penerimaan dan Lelang) yang dikembangkan terpilih sebagai Top 12 Inovasi Pelayanan Unit Kerja di lingkungan Kementerian Keuangan Tahun 2019 dalam Kompetisi Inovasi Kementerian Keuangan (KKIK) tahun 2019.
3. Meraih penghargaan Kantor Berpredikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tahun 2020.

A. TUGAS, FUNGSI, VISI DAN MISI KPKNL BEKASI

Berdasarkan Pasal 31 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, KPKNL Bekasi mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang. Dalam melaksanakan tugas tersebut KPKNL Bekasi menyelenggarakan fungsi:

1. Inventarisasi, Pengadministrasian, Pendayagunaan, Pengamanan Kekayaan Negara;
2. Registrasi, Verifikasi dan Analisa Pertimbangan Permohonan Pengalihan serta Penghapusan Kekayaan Negara;
3. Registrasi Penerimaan Berkas, Penetapan, Penagihan, Pengelolaan Barang Jaminan, Eksekusi, Pemeriksaan Harta Kekayaan Milik Penanggung Hutang/Penjamin Hutang;
4. Penyiapan Bahan Pertimbangan atas Permohonan Keringanan Jangka Waktu dan/atau Jumlah Hutang, Usul Pencegahan dan Penyanderaan Penanggung Hutang dan/atau Penjamin Hutang Serta Penyiapan Data Usul Penghapusan Piutang Negara;
5. Pelaksanaan Pelayanan Penilaian;
6. Pelaksanaan Pelayanan Lelang;
7. Penyajian Informasi di Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara, Penilaian, Piutang Negara dan Lelang;
8. Pelaksanaan Penetapan dan Penagihan Piutang Negara Serta Pemeriksaan Kemampuan Penanggung Hutang Atau Penjamin Hutang dan Eksekusi Barang Jaminan;
9. Pelaksanaan Pemeriksaan Barang Jaminan Milik Penanggung Hutang atau Penjamin Hutang Serta Harta Kekayaan Lain;
10. Pelaksanaan Bimbingan Kepada Pejabat Lelang;
11. Inventarisasi, Pengamanan, dan Pendayagunaan Barang Jaminan;
12. Pelaksanaan Pemberian Pertimbangan dan Bantuan Hukum Pengurusan Piutang Negara dan Lelang;
13. Verifikasi dan Pembukuan Penerimaan Pembayaran Piutang Negara dan Hasil Lelang; dan
14. Pelaksanaan administrasi KPKNL.

KPKNL Bekasi sebagai Kantor Berpredikat WBK dan WBBM, senantiasa berusaha memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dalam bidang pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara, dan lelang. KPKNL Bekasi berperan dalam meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berupa biaya administrasi pengurusan piutang negara dan bea lelang, maupun dalam melakukan pengamanan kekayaan negara melalui kegiatan inventarisasi dan penilaian Barang Milik Negara dan sertifikasi tanah pemerintah (Penertiban Barang Milik Negara). Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, KPKNL Bekasi selalu menjunjung tinggi nilai-nilai Kementerian Keuangan guna mewujudkan reformasi birokrasi berkesinambungan menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dalam rangka memberikan arah, inspirasi, serta menjaga semangat kerja seluruh jajarannya, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dalam hal ini KPKNL Bekasi memiliki visi dan misi sebagai berikut:

VISI

“Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan:
Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

MISI

1. Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara;
2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum;
3. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan kekayaan negara;
4. Menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan;
5. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat;

Dalam tatanan operasional, visi dan misi tersebut akan terus diupayakan untuk dicapai. Untuk mencapai visi dan misi tersebut, KPKNL Bekasi telah memberi motivasi dan arah kerja kepada seluruh pegawai dengan pedoman **”Melayani dengan SMART”** yaitu Simpatik, Mumpuni, Akuntabel, Responsif dan Terukur. Melalui moto tersebut, diharapkan setiap pegawai KPKNL Bekasi dalam melaksanakan tugas, selalu:

1. Simpatik

Simpatik dalam setiap melaksanakan tugas dan kegiatan pelayanan kepada *stakeholder*.

2. Mumpuni

Organisasi yang tangguh dan teruji dalam menghadapi tantangan dan perubahan.

3. Akuntabel

Produk pelayanan yang cepat, akurat, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

4. Responsif

Cepat tanggap dalam melayani pengguna jasa.

5. Terukur

Memberikan pelayanan dengan standar waktu yang telah ditetapkan, sehingga pengguna jasa merasakan pelayanan murah, cepat, dan tepat waktu.

Dengan pedoman “Melayani dengan SMART”, Simpatik, Mumpuni, Akuntabel, Responsif, dan Terukur, KPKNL Bekasi selalu memegang komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada para pemangku kepentingan (*stakeholder*).

B. PERMASALAHAN UTAMA (*STRATEGIC ISSUE*) PADA KPKNL BEKASI

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya (business process) untuk mewujudkan visi dan misi serta tujuan organisasi, KPKNL Bekasi mengalami beberapa kendala/permasalahan, diantaranya sebagai berikut:

1. Permasalahan pada Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara

Beberapa kendala/permasalahan terkait dengan pengelolaan dan penatausahaan BMN pada Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara adalah sebagai berikut:

- a. Berkaitan dengan sertifikasi BMN, kendala yang dihadapi yakni
 - 1) Mayoritas bidang tanah target pensertifikatan di KPKNL Bekasi merupakan target dari subordinasi, dan satuan kerja juga masuk dalam target pensertifikatan di KPKNL lainnya, sehingga membutuhkan waktu cukup lama di dalam penyiapan dokumen-dokumen persyaratan permohonan pensertifikatan BMN berupa tanah serta membatasi pelaksanaan koordinasi antara KPKNL, Kantor Pertanahan dan Satuan kerja yang menjadi target pensertifikatan.
 - 2) Satuan kerja sudah menyerahkan berkas permohonan pensertifikatan dari triwulan I, pengukuran juga sudah banyak dilakukan di triwulan I dan II, namun PBT baru terbit di triwulan IV, bahkan di bulan Desember 2022.
 - 3) Pengukuran sudah dilakukan di semester I, namun informasi di Kantor Pertanahan terkait adanya tumpang tindih maupun kendala lainnya justru diterima di triwulan IV, bahkan di bulan Desember 2022.
 - 4) Adanya aset hibah yang sertifikatnya masih merupakan sertifikat induk, sehingga harus menunggu proses pemecahan sertifikat oleh pemberi hibah (pemberi hibah tidak bersedia menyerahkan sertifikat induk dan melakukan proses pemecahan aset yang dihibahkan itu sendiri)
- b. Berkaitan dengan tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK, kendala yang dihadapi, yakni koordinasi teknis dengan unit kerja dalam hal pengumpulan data dan perhitungan pengukuran SBSK. IKU ini merupakan kegiatan yang relatif baru bagi seksi PKN, oleh karenanya perlu melakukan koordinasi yang intensif mengenai teknis pelaksanaannya serta formula perhitungan capaian IKU dengan unit kerja terkait.
- c. Berkaitan dengan persetujuan pengelolaan aset, kendala yang dihadapi, yakni :
 - 1) Petugas/operator BMN pada satuan kerja yang merangkap tugas lain sehingga updating tindak lanjut tidak dapat segera disampaikan kepada KPKNL.
 - 2) Tindak lanjut atas persetujuan melibatkan koordinasi satuan kerja dengan unit kerja/pihak lain sehingga terkadang hambatan bukan semata-mata dari satuan kerja bersangkutan.

- 3) Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) masih terdapat beberapa yang belum valid data NPWP nya sehingga proses persetujuan lebih lama.
- 4) Terdapat potensi calon penyewa keberatan dengan nilai sewa yang ditetapkan dalam persetujuan.
- 5) Kesadaran Satuan kerja untuk *update* data di aplikasi SIMAN masih rendah.
- 6) Dokumen yang diajukan banyak yang belum lengkap, sehingga perlu konfirmasi kembali dan menyampaikan surat kelengkapan dokumen, yang membuat persetujuan menjadi lebih lama.
- 7) Terdapat Satuan kerja yang belum tahu dokumen-dokumen yang dipersyaratkan seperti dalam pemanfaatan sewa.
- 8) Kurang tanggapnya Sataker menindaklanjuti penjualan ke lelang atau pemanfaatan ke perjanjian sewa.

2. Permasalahan pada Seksi Piutang Negara

Permasalahan di Seksi Piutang Negara sangat erat hubungannya dengan pencapaian target baik target PNDS maupun target Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara. Sebagaimana kita diketahui sejak adanya Putusan MK Nomor 77/PUU-IX/2011 tanggal 25 September 2011, maka semua piutang negara dari BUMN maupun BUMD yang selama ini menjadi andalan dalam pencapaian target PNDS dan BIAD telah dikembalikan kepada penyerah piutang. Disamping itu dengan akibat adanya pandemi *COVID-19*, pengurusan piutang Negara juga mengalami dampak yang cukup signifikan, dimana terdapat beberapa debitur yang tidak mampu lagi untuk melakukan angsuran rutin.

Saat ini Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) yang ada dalam pengurusan KPKNL Bekasi sebagian besar merupakan penyerahan piutang DJKN, Piutang eks Bank Dalam Likuidasi (BDL), eks PT PPA, eks BPPN, sebagian besar tidak diketahui keberadaannya (sudah dibuktikan dengan keterangan aparat Pemda setempat), tidak mempunyai barang jaminan atau barang jaminan tidak dan atau sudah tidak memiliki nilai ekonomis (tidak *marketable*) serta terdapat juga objek jaminan yang berupa sertifikat tanah tidak diketemukan lokasinya.

Aparat pemerintah setempat tidak bisa menunjukkan lokasi tersebut dengan alasan ada pengembangan/ perubahan wilayah di Kabupaten Bekasi. Sedangkan untuk piutang dari Kementerian/Lembaga lainnya, seperti Kementerian Koperasi dan UMKM yang penyerahan piutangnya tidak disertai dengan barang jaminan karena piutang tersebut merupakan bantuan dana bergulir, RSUD yang penyerahannya dilakukan oleh Pemda Kabupaten Bekasi sebagian besar saat ini debitur tidak diketahui keradaannya atau meninggal dan

tidak dapat diketahui keberadaan ahli waris, Kementerian KOMINFO yang tidak memiliki barang jaminan dan instansi lainnya.

Selanjutnya untuk penyerahan dari Kementerian Perindustrian dan Perdagangan (LPT Indag) telah selesai seluruhnya tahun 2019 dan belum ada penyerahan baru lagi. Secara umum, kinerja pada Seksi Piutang Negara tercapai dengan baik, hal ini dibuktikan dengan tercapainya target yang ditetapkan pada IKU yang menjadi tanggung jawab Seksi Piutang Negara, dengan indikasi tercapainya target yang ditetapkan sedangkan IKU jumlah PNBPN dari biaya administrasi pengurusan piutang negara dan jumlah BKPN piutang negara yang dapat diselesaikan juga tercapai.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa beberapa permasalahan dalam pengurusan Piutang Negara pada KPKNL Bekasi, sebagai berikut:

- a. Masih terdapat BKPN yang bermasalah dan tidak lengkap serta tidak didukung dengan barang jaminan sehingga dalam pengeloalannya belum mencapai hasil yang optimal;
- b. Terdapat debitur penyerahan DJKN yang mempunyai hutang sangat besar namun tidak disertai dengan barang jaminan, serta tidak diketahui keberadaannya.
- c. Sebagian besar penanggung hutang khususnya piutang penyerahan DJKN karena barang jaminan tidak ditemukan keberadaannya dan Debitur tidak mempunyai kemampuan usaha dan finansial untuk menyelesaikan hutangnya, sehingga optimalisasi pengurusannya hanya dapat dilakukan melalui tahap penetapan Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT)
- d. Kurangnya penyerahan BKPN baru;
- e. Terdapat Debitur kurang beritikad baik dalam menyelesaikan hutangnya.

3. Permasalahan pada Seksi Pelayanan Penilaian

Permasalahan yang sering terjadi dalam pelaksanaan tugas pada Seksi pelayanan penilaian sebagai berikut:

- a. Kurangnya pemahaman dari Pengguna Barang mengenai variabel-variabel yang perlu dipertimbangkan dalam penentuan nilai suatu objek penilaian.
- b. Belum memadainya database objek pembanding berupa tanah/bangunan dan selain tanah/bangunan yang mamadai untuk mendukung pelaksanaan penilaian di Seksi Pelayanan Penilaian;
- c. Belum adanya permodelan terhadap penilaian atas sewa objek properti yang bersifat umum seperti sewa gedung pertemuan, sewa ruang, sewa BTS, sewa papan reklame dll;

4. Permasalahan pada Seksi Pelayanan Lelang

Dalam pelaksanaan pelayanan lelang masih terdapat beberapa Permasalahan di Seksi Pelayanan Lelang, antara lain:

- a. Rendahnya minat masyarakat terhadap lelang properti, sehingga lelang cenderung susah untuk laku;
- b. Daya beli masyarakat yang rendah;
- c. Kondisi perekonomian yang lesu terlebih dalam kondisi pandemi Covid-19;
- d. Kondisi objek lelang masih banyak belum free and clear membuat legalitas objek lelang tersebut menjadi tidak kuat untuk dapat dilakukan lelang.
- e. Kurangnya jumlah SDM Fungsional Pelelang dimana berkas permohonan lelang mencapai 690 berkas dan frekuensi lelang pada tahun 2022 adalah 1403 kali, sehingga menyebabkan besarnya *workload* dari Pelelang yang membuat menurunnya kualitas *work-life balance* dari Pelelang.

5. Permasalahan pada Seksi Hukum dan Informasi

Permasalahan yang kerap terjadi pada Seksi Hukum dan Informasi secara umum, sebagai berikut:

- a. Dalam hal biaya pengambilan putusan perkara Pengadilan, bukti pembayaran/kuitansi dari pihak Pengadilan tidak sesuai dengan ketentuan sehingga tidak memungkinkan untuk dibayarkan oleh DIPA KPKNL Bekasi;
- b. Penataan arsip BKNP yang perlu ditingkatkan;
- c. Kurangnya SDM pada Seksi Hukum dan Informasi baik dari segi jumlah maupun kompetensi terutama dibidang penanganan perkara sehingga belum optimal dalam menangani penanganan perkara.

6. Permasalahan pada Seksi Subbagian Umum

Terdapat 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menjadi tanggung jawab pada Subbagian Umum yaitu IKU Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai, IKU Indeks Efektifitas Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator dan dan IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran. Untuk IKU Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai dan IKU Indeks Efektifitas Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator dan mencapai target yang ditetapkan, sedang IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran belum mencapai target yang ditetapkan. Pada IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran, terdapat beberapa hal yang menyebabkan capaian IKU tidak tercapai, antara lain:

- a. Terdapat deviasi halaman III DIPA yang cukup besar
- b. Capaian output yang tidak maksimal

7. Permasalahan pada Seksi Kepatuhan Internal

Terdapat 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menjadi tanggung jawab pada Seksi Kepatuhan Internal yaitu IKU Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja. Permasalahan pada IKU Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja yaitu masih terdapat pegawai yang belum memahami secara penuh tentang pentingnya pengelolaan kinerja untuk mendukung kinerja organisasi maupun kinerja individu yang bersangkutan. Hal ini secara tidak langsung dapat menurunkan kesadaran dari pegawai yang bersangkutan untuk *aware* terhadap pengelolaan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Pelaksanakan tugas dan fungsi KPKNL Bekasi berdasarkan Rencana Kinerja Tahun 2022, telah disusun berdasarkan peta strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). Kantor Pusat DJKN menetapkan target kinerja KPKNL Bekasi Tahun 2022 yang dituangkan dalam Kontrak Kinerja dan dijabarkan dalam bentuk Indikator Kinerja Utama (IKU), sehingga ikhtisar Kontrak Kinerja Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

NO./KODE	URAIAN IKU	ANGKA KREDIT	TARGET			
			KUANTITAS/ OUTPUT	KUALITAS/ MUTU	WAKTU	BIAYA
<i>Stakeholder Perspective (25%)</i>						
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian					
1a-CP	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang		100%	100	12 bulan	
1b-CP	Persentase Produktivitas Lelang		36%	100	12 bulan	
<i>Customer Perspective (15%)</i>						
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa					
2a-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang		100%	100	12 bulan	
2b-CP	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara		100%	100	12 bulan	
3	Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi					
3a-CP	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL		4,51	100	12 bulan	

<i>Internal Process Perspective (30%)</i>						
4	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal					
4a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK		65%	100	12 bulan	
4b-CP	Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertipikatkan		100%	100	12 bulan	
4c-CP	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)		100%	100	12 bulan	
4d-CP	Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)		100%	100	12 bulan	
5	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional					
5a-CP	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian		19%	100	12 bulan	
6	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif					
6a-CP	Persentase Pelaksanaan Lelang EAuction dan E-Conventional Auction		92%	100	12 bulan	
6b-CP	Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN		10%	100	12 bulan	
7	Edukasi yang Efektif					
7a-N	Tingkat Efektivitas Edukasi dan Komunikasi		91	100	12 bulan	
8	Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif					
8a-CP	Persentase Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Kekayaan Negara		85%	100	12 bulan	
<i>Learning and Growth Perspective (30%)</i>						

9	SDM yang Kompeten					
9a-N	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai		100%	100	12 bulan	
10	Organisasi yang Fit For Purpose					
10a-N	Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja		80	100	12 bulan	
10b-N	Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator		90	100	12 bulan	
11	Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal					
11a-CP	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran		95,5%	100	12 bulan	
11b-N	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan		100%	100	12 bulan	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada Tahun Anggaran 2022, KPKNL Bekasi mencatatkan kenaikan persentase Nilai Kinerja Organisasi (NKO) berdasarkan capaian target yang ditetapkan untuk Tahun Anggaran 2022 dari tahun sebelumnya. Tahun 2021, KPKNL Bekasi mencatatkan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 108,94%, sementara pada tahun 2022, KPKNL Bekasi mencatatkan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 113,42%.

Berikut ini merupakan gambaran tentang perbandingan antara target dan realisasi capaian kinerja tahun 2022:

KODE	IKU	TARGET 2022	REALISASI 2022
<i>Stakeholder Perspective (25%)</i>			
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian		
1a-CP	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%	144,54%
1b-CP	Persentase Produktivitas Lelang	36%	39,66%
<i>Customer Perspective (15%)</i>			
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa		
2a-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%	141,95%
2b-CP	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100%	223,75%
3	Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi		
3a-CP	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL	4,51	4,57
<i>Internal Process Perspective (30%)</i>			
4	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal		
4a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	65%	82,90%
4b-CP	Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertipikatkan	100%	101,14%
4c-CP	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	100%	143,08%
4d-CP	Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%	102,88%

5	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional		
5a-CP	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	19%	0,80%
6	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional		
6a-CP	Persentase Pelaksanaan Lelang EAuction dan E-Conventional Auction	92%	100%
6b-CP	Deviasi Data PNPB Fungsional DJKN	10%	0,00%
7	Edukasi yang Efektif		
7a-N	Tingkat Efektivitas Edukasi dan Komunikasi	91	94,66
8	Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif		
8a-CP	Persentase Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Kekayaan Negara	85%	97,14%
Learning and Growth Perspective (30%)			
9	SDM yang Kompeten		
9a-N	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	100%	120%
10	Organisasi yang Fit For Purpose		
10a-N	Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja	80	97,17
10b-N	Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	90	97,00
11	Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal		
11a-CP	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95,5%	93,01%
11b-N	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	100%	180,76%

Perbandingan capaian kinerja KPKNL Bekasi Tahun 2022 dengan 2 (dua) tahun capaian kinerja sebelumnya, yakni tahun 2020 dan tahun 2021 dalam persentase adalah sebagai berikut:

Nomor	IKU	REALISA SI 2020	REALISA SI 2021	REALISA SI 2022
1	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	55,79%	83,79%	144,54%
2	Persentase Produktivitas Lelang	24,76%	29,12%	39,66%
3	Persentase Realisasi Pokok Lelang			141,95%
4	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	130,37%	122%	223,75%

5	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL	4,66	4,65	4,57
6	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	100%	100%	82,90%
7	Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertipikatkan	100%	102,96	101,14%
8	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	179,11%	100,57%	143,08%
9	Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	310%	118,52	102,88%
10	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian			0,80%
11	Persentase Pelaksanaan Lelang EAuction dan E-Conventional Auction	100%	100%	100%
12	Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN			0,00%
13	Tingkat Efektivitas Edukasi dan Komunikasi	104,16	91,61	94,66
14	Persentase Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Kekayaan Negara	95,83%	93,75%	97,14%
15	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	120%	120%	120%
16	Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja	136,29	96,52	97,17
17	Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator			97,00
18	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	101,71%	96,82%	93,01%
19	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan			180,76%

B. Analisis Kinerja

1. Permasalahan dan Solusi atas Capaian Kinerja dan Kegiatan Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara

a. Isu Utama dan Implikasi

- 1) Pada Tahun 2022, capaian realisasi PNBPN dari Pengelolaan BMN adalah sebesar Rp7.501.593.834,00 melebihi dari target yang ditetapkan yaitu Rp5.400.000.000 (138,92%). Target PNBPN dari pengelolaan dapat tercapai dengan bantuan penerimaan dari BLU sebesar Rp4.381.607.273,00 (58,41% dari realisasi). Jika tidak ada pendapatan dari BLU tersebut, capaian PNBPN dari Pengelolaan BMN hanya sebesar Rp3.119.986.561,00 (57,78% dari target).

- 2) Formula perhitungan pengukuran SBSK yang kerap terdapat perubahan/penyesuaian formula dari Direktorat BMN.
- 3) Jika dilihat dari sisi rincian, nominatif dan BBSK, akan terlihat tidak sesuai dengan target (capaian nominatif kurang dari target nominatif dan capaian BBSK melebihi target BBSK). Namun dikarenakan capaian Pensertipikatan BMN merupakan gabungan dari nominatif dan BBSK, maka disimpulkan bahwa target Pensertipikatan BMN 2022 telah tercapai.
- 5) Masih terdapat persetujuan pengelolaan BMN yang belum ditindaklanjuti satuan kerja.
- 6) Terdapat komponen IKU yang kendalanya ada di Pengelola Barang (Seksi PKN) seperti Jumlah Satuan Kerja Yang Menyampaikan Laporan Wasdal dan Jumlah Persetujuan Pengelolaan BMN yang telah ditindaklanjuti Satuan Kerja

b. Akar Masalah

- 1) Target yang masih tinggi dibandingkan potensi PNBPN yang ada.
- 2) IKU Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK masih relatif baru sehingga perlu koordinasi intensif mengenai teknis pelaksanaannya dan formula perhitungan capaian IKU dengan unit kerja terkait. Kendala lain adalah Satuan kerja belum mengirimkan form pendataan SBSK yang harus diisi.
- 3)Kantah Kota Bekasi terdapat perubahan kebijakan untuk menambahkan persyaratan KKPR untuk BMN sehingga bidang tanah yang sudah terbit Peta Bidang Tanah (PBT) tidak bisa diproses lebih lanjut.
- 4) Petugas/operator BMN pada satuan kerja yang merangkap tugas lain sehingga updating tindak lanjut tidak dapat segera disampaikan kepada KPKNL. Tindak lanjut atas persetujuan melibatkan koordinasi satuan kerja dengan unit kerjalain sehingga terkadang hambatan bukan semata-mata dari satuan kerja bersangkutan.
- 5) Komponen IKU yang berada / kendali di Seksi PKN mewajibkan satuan kerja binaan Seksi PKN agar menyampaikan / melaporkan (dibutuhkan kepedulian satuan kerja)

c. Tindakan yang telah Dilaksanakan

- 1) Menghimbau satuan kerja untuk segera menindaklanjuti persetujuan sewa dan penjualan yang sudah diterima.
- 2) Pemberian piagam apresiasi kepada satuan kerja yang memiliki kontribusi PNBPN tertinggi dari Pengelolaan BMN.
- 3) Melakukan sosialisasi pendahuluan ke satuan kerja yang menjadi target terkait pelaksanaan pengukuran SBSK 2022 melalui surat Kepala KPKNL Bekasi nomor S-3671/WKN.08/KNL.02/2021 dan S68/KNL.0802/2022 dan melakukan koordinasi dengan Satuan kerja terkait.

- 4) Melaksanakan pelaksanaan rapat koordinasi dengan Satuan kerja dan Kantah dan Kanwil DJKN DKI Jakarta untuk pembahasan pensertipikatan.
- 5) Kunjungan ke Kantah Kota Bekasi dan Kantah Kabupaten Bekasi untuk memastikan progress dan kesesuaian data yang diusulkan oleh satuan kerja.
- 6) Terus mengingatkan semua satker agar segera menyerahkan/melengkapi berkas dan berkoordinasi dengan Kantah.
- 7) Rapat koordinasi antara Kantah Kota Bekasi, PJN I, Polres Metro Bekasi Kota, dan Pemkot Bekasi.
- 8) Menyusun rencana kerja dan pengumpulan data sekunder untuk portfolio aset. Kemudian melakukan koordinasi dengan satker yang menjadi target pengukuran kinerja set pada tahun 2022, Menyusun laporan evaluasi aset berdasarkan hasil analisis dan survei lapangan.
- 9) Mengadakan kegiatan sosialisasi kepada stakeholder seksi PKN.

d. Rekomendasi Rencana Aksi

- 1) Tetap berkoordinasi dengan satuan kerja untuk memantau tindak lanjut persetujuan pengelolaan BMN yang berdampak pada PNBK.
- 2) Mendorong satuan kerja agar melakukan percepatan pengajuan usulan penjualan atas BMN yang telah rusak berat/dihentikan penggunaannya.
- 3) Berkoordinasi dengan satuan kerja terkait potensi pemanfaatan BMN.
- 4) Selalu berkoordinasi dengan satuan kerja agar segera menyampaikan laporan pelaksanaan tindak lanjut atas persetujuan pengelolaan BMN yang telah diterimanya.
- 5) Melanjutkan pengumpulan data dan perhitungan pengukuran SBSK.
- 6) Melakukan koordinasi secara langsung dengan Kantor Pertanahan dan juga satuan kerja atas progress kegiatan pensertipikatan BMN berupa tanah.
- 8) Melaksanakan pengukuran kinerja aset pada satuan kerja yang menjadi target pengukuran kinerja aset pada tahun 2023, khususnya pada satuan kerja lain yang belum dilakukan survei lapangan pengukuran kinerja atas asetnya.
- 9) Selalu berkoordinasi dengan satker agar segera menyampaikan laporan pelaksanaan tindak lanjut atas persetujuan pengelolaan BMN yang telah diterimanya.

2. Permasalahan dan Solusi atas Capaian Kinerja dan Kegiatan Seksi Piutang Negara

a. Isu Utama dan Implikasi

- 1) Beberapa debitur tidak diketahui keberadaannya, dan terdapat barang jaminan tidak ditemukan karena perubahan/pengembangan wilayah.
- 2) Ada debitur yang biasa mengangsur, tetapi karena usahanya terdampak pandemi Covid-19, maka nilai angsurannya berkurang dan tidak rutin.
- 3) Crash program sebagai program nasional dalam upaya penyelesaian utang.
- 4) BKPN selesai mayoritas melalui PSBDT.
- 5) Beberapa BKPN nilainya diatas Rp500 juta sehingga harus dilakukan pemeriksaan.
- 6) Mayoritas BKPN tahun 2018 Surat Paksa belum disampaikan/belum dilakukan penelitian lapangan
- 7) Pelaksanaan edukasi dan komunikasi PN telah terlaksana kepada debitur BKPN dan akan terus dioptimalkan melalui tatap muka secara langsung pada saat penelusuran maupun penelitian lapangan.

b. Akar Masalah

- 1) Keberadaan debitur tidak diketahui, sehingga perlu pemeriksaan lebih lanjut. Namun, karena tidak memiliki SDM untuk melakukan pemeriksaan, maka untuk pemeriksaan sendiri perlu dimintakan bantuan kepada Kanwil.
- 2) Jumlah utang besar tidak didukung barang jaminan, atau andaikan pun terdapat barang jaminan, barang jaminannya tidak marketable, seperti girik/letter C, lokasinya tidak dapat diakses, maupun BPKB atau deposito yang sudah tidak memiliki nilai.
- 3) Masa berlaku sertifikat (SHGB) barang jaminan telah berakhir.
- 4) Barang jaminan tidak marketable.
- 5) Dari jumlah BKPN aktif 240 berkas, hanya 33 BKPN yang memiliki barang jaminan, sedangkan 207 BKPN lainnya tidak ada barang jaminan, sehingga sulit diselesaikan melalui SPPNL (pelunasan).
- 6) Jumlah hutang besar tidak didukung barang jaminan.
- 7) Selalu menjalin komunikasi dan kedekatan yang intens dengan debitur agar dapat dilakukan penyelesaian serta memberi tanggapan yang baik dan solutif atas setiap permasalahan/ penyelesaian PN sesuai dengan kondisi BKPN.

c. Tindakan yang telah Dilaksanakan

- 1) Aktif mengingatkan debitur untuk melakukan pembayaran/angsuran, baik kepada debitur yang tidak memiliki barang jaminan maupun debitur yang memiliki barang jaminan (*shock therapy* akan eksekusi barang jaminan).
- 2) Mengirimkan kembali surat penagihan dan surat pemberitahuan kepada debitur terkait *Crash Program*.
- 3) Melakukan penagihan dan penelusuran aset serta berkoordinasi dengan aparat Kelurahan/desa.

- 4) Pelaksanaan lelang barang jaminan.
- 5) Melakukan pemetaan profil BKPN khususnya tahun 2018 ke bawah agar dapat diintensifkan pengurusannya melalui mekanisme pengurusan sederhana.
- 6) Mengirimkan kembali surat penagihan dan surat pemberitahuan *crash program*.
- 7) Melakukan sosialisasi *crash program* maupun penyelesaian PN kepada debitur pada saat penelitian, penelusuran, maupun penagihan serta Melakukan sosialisasi PP 28 Tahun 2022 Tentang Pengurusan Piutang Negara Oleh Panitia Urusan Piutang Negara

d. Rekomendasi Rencana Aksi

- 1) Optimalisasi pengurusan PN melalui penyampaian Surat Paksa dan penelitian lapangan, khususnya untuk debitur dengan jumlah hutang sampai dengan kurang dari Rp500 juta yang tidak memiliki barang jaminan agar dapat ditindaklanjuti dengan PSBDT.
- 2) Tetap aktif mengingatkan debitur untuk melakukan pembayaran/angsuran, menghimbau untuk mengikuti program keringanan hutang dan melakukan penelusuran keberadaan debitur dan barang jaminan.
- 3) Melanjutkan penelusuran debitur dan barang jaminan dan berkoordinasi dengan pemda setempat.
- 4) Pemetaan BKPN dibawah Tahun 2018 untuk penurunan outstanding.
- 5) Peningkatan pengurusan piutang negara secara optimal melalui program keringanan hutang.
- 6) Melakukan sosialisasi *crash program* maupun penyelesaian PN kepada debitur pada saat penelitian, penelusuran, maupun penagihan serta Melakukan sosialisasi PP 28 Tahun 2022 Tentang Pengurusan Piutang Negara Oleh Panitia Urusan Piutang Negara

3. Permasalahan dan Solusi atas Capaian Kinerja dan Kegiatan Seksi Lelang

a. Isu Utama dan Implikasi

- 1) Banyak lelang yang dinyatakan TAP bahkan batal sehingga penerimaan negara tidak optimal dan pelaksanaan lelang tidak maksimal. Adanya 3 Lelang dengan nilai pokok lelang yang sangat tinggi mendongkrak capaian PNBPN Lelang.
- 2) Minat masyarakat terhadap lelang masih rendah (khususnya properti)
- 3) Terdapat beberapa masukan, keluhan, dan kritik dari stakeholder
- 4) Perbedaan jumlah PNBPN yang diinput pada Dropbox lelang dengan data pada Simponi/Spn sebesar 0,00%.
- 5) Menerapkan e-auction secara penuh dari permohonan hingga pelaksanaan melalui lelang.go.id.

b. Akar Masalah

- 1) Rendahnya peminat lelang di masyarakat, terutama untuk lelang properti, sehingga lelang cenderung susah untuk laku.
- 2) Daya beli masyarakat yang rendah.
- 3) Kondisi perekonomian yang lesu terlebih dalam kondisi pandemic *Covid-19*.
- 4) Terdapat objek lelang maupun legalitas subyek dan objek lelang yang belum free and clear.
- 5) Berkas permohonan lelang secara digital cukup banyak sekitar 690 berkas, sedang jumlah Jafung Pelelang hanya 4 orang.
- 6) Pelaporan dropbox masih diinput secara manual menggunakan file excel dengan kolom inputan yang banyak, sehingga rawan terjadi salah input, salah rumus maupun kendala teknis lainnya mengingat penarikan data dilakukan secara berjenjang (KPKNL>Kanwil>Kantor Pusat).

c. Tindakan yang telah Dilaksanakan

- 1) Penggalan potensi lelang ke pemohon lelang.
- 2) Pemberian Apresiasi terhadap pemohon lelang dengan pokok lelang terbesar dan produktivitas lelang terbaik.
- 3) Menggalakkan publikasi lelang melalui berbagai media.
- 4) Imbauan kepada Pemohon Lelang agar mengajukan nilai limit berpedoman pada Laporan Penilaian setinggi-tingginya harga pasar.
- 5) Mengajukan ND penambahan Jafung Pelelang
- 6) Melakukan rekonsiliasi data FokusPN, Dropbox, Simponi dan Span secara internal antara Seksi Pelayanan lelang, Seksi Hukum dan Informasi (Bendahara Penerimaan) dan Sub bagian Umum.
- 7) Mengadakan kegiatan sosialisasi kepada stakeholder seksi lelang

d. Rekomendasi Rencana Aksi

- 1) Penggalan potensi lelang, termasuk terhadap BMN di satuan kerja yang sudah tidak digunakan dan juga terhadap kurator dan perbankan yang memiliki potensi nilai objek lelang yang tinggi, Kejaksaan yang memiliki potensi frekuensi tinggi.
- 2) Sosialisasi dengan pihak pemohon lelang baik satuan kerja, bank, maupun balai lelang dan menggalakkan publikasi lelang melalui berbagai media.
- 3) Apresiasi terhadap pemohon lelang dengan pokok lelang terbesar dan produktivitas lelang terbaik.
- 4) Kembali menggalakkan publikasi lelang melalui berbagai media.
- 5) Melakukan penginputan data FocusPN dan dropbox lelang dengan mengacu pada data Simponi/Span, melakukan penginputan dropbox

secara berkala dengan akurat serta melakukan rekonsiliasi internal secara berkala.

7) Mengadakan kegiatan sosialisasi kepada stakeholder seksi lelang

4. Permasalahan dan Solusi atas Capaian Kinerja dan Kegiatan Seksi Penilaian

a. Isu Utama dan Implikasi

Nilai hasil penilaian yang disampaikan kepada Pengelola Barang relatif lebih tinggi dibandingkan nilai yang diusulkan oleh Pengguna Barang, sehingga muncul persepsi dari Pengguna Barang bahwa nilai yang dikeluarkan oleh Tim Penilai DJKN terlalu tinggi, sehingga seringkali muncul keraguan dari Pengguna Barang mengenai tingkat daya jual atas BMN yang dinilai tersebut

b. Akar Masalah

Kurangnya pemahaman dari Pengguna Barang mengenai variabel-variabel yang perlu dipertimbangkan dalam penentuan nilai suatu objek penilaian.

c. Tindakan yang telah Dilaksanakan

- 1) Memberikan edukasi kepada pengguna barang KPKNL Bekasi secara langsung pada saat Tim Penilai melakukan survei lapangan
- 2) Melakukan analisis pasar yang lebih mendalam, khususnya di tengah kondisi Pandemi *Covid-19* ini.

d. Rekomendasi Rencana Aksi

- 1) Melanjutkan pemberian edukasi secara langsung kepada pengguna barang pada saat survei lapangan.
- 2) Memperkuat analisis pasar properti sehingga nilai yang terbentuk mencerminkan harga yang berlaku di pasaran pada kondisi tertentu.

5. Permasalahan dan Solusi atas Capaian Kinerja dan Kegiatan Subbagian Umum

a. Isu Utama dan Implikasi

- 1) Adanya kesibukan pegawai dalam melaksanakan tugas dalam kota dan luar kota, sehingga sulit untuk mengikuti diklat/e-learning/PJJ
- 2) Dalam rangka menyelaraskan pemahaman/persepsi pegawai Kementerian Keuangan terhadap arahan dan/atau kebijakan yang disampaikan pimpinan serta untuk menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Keuangan nomor SE-3/MK.1/2020 mengenai Pelaksanaan FGD di Lingkungan Kementerian Keuangan. Mendorong pencapaian Visi dan Misi Kemenkeu khususnya KPKNL Bekasi dan sebagai *Early Warning System* (sistem peringatan dini) untuk menghindari adanya Fraud dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

- 3) Nilai IKU PKPA Satuan Kerja tidak maksimal. Komponen yang belum maksimal yaitu Kesesuaian Perencanaan dengan Pelaksanaan (Deviasi Halaman III DIPA) dan Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan (Capaian Output)
- 4) Terdapat komponen IKU yang kemungkinan tidak tereksesusi khususnya pengadaan (*etendering, e-purchasing*), dll

b. Akar Masalah

- 1) Adanya kesibukan pegawai dalam melaksanakan tugas dalam kota dan luar kota, sehingga sulit untuk mengikuti diklat/e-learning/PJJ
- 2) Perlu SDM yang memiliki karakter dan mental yang kuat, kompeten, berpengalaman dan berkinerja tinggi di Kementerian Keuangan, dengan berdasarkan visi, misi, Tugas ASN, Fungsi ASN dan nilai-nilai Kementerian Keuangan. Penguatan Budaya Kemenkeu diperlukan diantaranya sebagai bentuk antisipasi adanya pelanggaran disiplin maupun perilaku negatif pegawai.
- 3) Terdapat deviasi halaman III DIPA yang cukup besar dan capaian output yang belum tercapai.
- 4) Capaian Output yang tidak maksimal adalah capaian dari output Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara.
- 5) Pengadaan Non Belanja Modal selalu dengan Pengadaan Langsung / Penunjukan Langsung

c. Tindakan yang telah Dilaksanakan

- 1) Menyampaikan imbauan kepada pegawai yang bersangkutan untuk mengikuti diklat baik melalui e-learning, PJJ dan tatap muka dan menyampaikan usulan kepada kantor pusat untuk memanggil peserta diklat pegawai yang bersangkutan..
- 2) Telah dilaksanakan kegiatan FGD Pejabat Administrator pada Q4 tanggal 22 Desember 2022 kepada seluruh pegawai KPKNL Bekasi, dengan tujuan memberikan pemahaman atas kebijakan yang diambil pimpinan Kementerian Keuangan dengan mengetengahkan Tema “Penguatan Budaya Kemenkeu Mendukung Layanan Digital dan Penerimaan Optimal”.
- 3) Melakukan koordinasi secara berkala dengan KPPN Bekasi dan Kanwil Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat terkait pelaksanaan anggaran.
- 4) Melakukan *multi layer checking* pembuatan SPM dengan melibatkan Operator, Bendahara Pengeluaran, PPSPM, dan PPK.
- 5) Melakukan revisi administrasi dalam rangka penyesuaian halaman III DIPA.
- 6) Melakukan koordinasi dengan Seksi Teknis terkait capaian output yang ditargetkan dalam DIPA.

7) Menghimbau pejabat pengadaan untuk melakukan proses pengadaan barang menggunakan metode pengadaan yg termuat dalam IKU (*epurchasing, e-tendering, e-catalog*) dll

d. Rekomendasi Rencana Aksi

- 1) Mengusulkan nama-nama pegawai untuk mengikuti diklat yang sesuai dengan pendidikan yang dimiliki. Dan mengingatkan kembali untuk mengikuti diklat.
- 2) Melaksanakan kegiatan FGD Administrator pada Q1 2023 kepada seluruh pegawai KPKNL Bekasi.
- 3) Terus melakukan koordinasi secara berkala dengan KPPN Bekasi dan Kanwil Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat terkait pelaksanaan anggaran.
- 4) Melakukan koordinasi dengan Seksi Teknis terkait capaian output yang ditargetkan dalam DIPA.
- 5) Pejabat pengadaan agar dapat melakukan proses pengadaan barang menggunakan metode pengadaan yg termuat dalam IKU (*epurchasing, e-tendering, e-catalog*) dll

6. Permasalahan dan Solusi atas Capaian Kinerja dan Kegiatan Seksi Kepatuhan Internal, Hukum dan Informasi

a. Isu Utama dan Implikasi

Terdapat Perbedaan jumlah PNPB yang diinput pada FocusPN dengan data pada Simponi/Span sebesar 0,00%

b. Akar Masalah

Pelaporan dropbox masih diinput secara manual menggunakan file excel dengan kolom inputan yang banyak, sehingga rawan terjadi salah input, salah rumus maupun kendala teknis lainnya mengingat penarikan data dilakukan secara berjenjang (KPKNL>Kanwil>Kantor Pusat).

c. Tindakan yang telah Dilaksanakan

Melakukan rekonsiliasi data FocusPN, Dropbox, Simponi dan Span secara internal antara Seksi Pelayanan lelang, Seksi Hukum dan Informasi (Bendahara Penerimaan) dan Subbagian Umum.

d. Rekomendasi Rencana Aksi

- 1) Melakukan penginputan data FocusPN dengan mengacu pada data Simponi/Span.
- 2) Melakukan penginputan data FocusPN secara berkala dan akurat.
- 3) Melakukan rekonsiliasi internal secara berkala.

C. Hal yang Mendukung, serta Kendala Pencapaian Rencana/Target dan Langkah-Langkah yang Telah Diambil dalam Mengatasi Kendala

1. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara

Pada Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara hal yang mendukung tercapainya rencana/target atau alasan tidak tercapainya target sebagai berikut:

- a. Kerjasama antar lini (antara atasan dengan bawahan, maupun antar seksi) di internal KPKNL Bekasi sangat mempengaruhi tercapainya target pada Seksi PKN;
- b. Dukungan sarana dan prasarana pada KPKNL Bekasi sangat menunjang kelancaran proses pencapaian target;
- c. Koordinasi dan kerjasama yang intensif dengan stakeholders;
- d. Pemberian pemahaman terhadap satuan kerja melalui sosialisasi kebijakan Pengelolaan/Penatausahaan BMN dan bimbingan teknis aplikasi SIMAK BMN, Persediaan, SIMAN, SiMantap.

Kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil antara lain:

- a. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan *stakeholders*;
- b. Menjadikan sarana media sosial (*Whatsapp Group*) sebagai saluran informasi dan penyampaian kendala bagi dan dari satuan kerja; dan
- c. Pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis yang berkesinambungan kepada satuan kerja, terutama peraturan-peraturan/kebijakan-kebijakan yang baru terkait pengelolaan/penatausahaan BMN termasuk dalam hal Revaluasi BMN.

2. Seksi Piutang Negara

Pada Seksi Piutang Negara, hal yang mendukung tercapainya rencana/target atau alasan tidak tercapainya target sebagai berikut:

- a. Kerjasama antar lini (antara atasan dengan bawahan, maupun antar seksi) di internal KPKNL sangat mempengaruhi tercapainya target pada Seksi PN;
- b. Dukungan sarana dan prasarana pada KPKNL Bekasi sangat menunjang kelancaran proses pencapaian target;
- c. Koordinasi dan kerjasama yang intensif dengan stakeholders penyerah piutang;

Kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil antara lain:

- a. Selalu memberikan pembinaan dan pengarahan serta dukungan dan penghargaan kepada para pegawai sehingga semangat dan motivasi untuk berkinerja baik selalu terjaga;
- b. Selalu mengikutkan pegawai apabila ada kegiatan diklat yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas SDM di bidang Piutang Negara;

- c. Penggalian potensi piutang Piutang Daerah dengan cara melakukan sosialisasi ke instansi/lembaga pemerintah di Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi.

3. Seksi Pelayanan Penilaian

Pada Seksi Pelayanan Penilaian, hal yang mendukung tercapainya rencana/target atau alasan tidak tercapainya target sebagai berikut:

- a. Kerjasama antar seksi dalam internal KPKNL terutama dengan seksi PKN sangat mempengaruhi tercapainya target pada Seksi Pelayanan Penilaian;
- b. Dukungan sarana dan prasarana pada KPKNL Bekasi sangat menunjang kelancaran proses pencapaian target;

Kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil antara lain:

- a. Koordinasi yang intensif dengan Kanwil DJKN Jabar dan Direktorat Penilaian
- b. Koordinasi dan kerjasama yang intensif dengan stakeholders;
- c. Membuat program kegiatan pembentukan data pembanding.

4. Seksi Pelayanan Lelang

Pada Seksi Pelayanan Lelang, hal yang mendukung tercapainya rencana/target atau alasan tidak tercapainya target sebagai berikut:

- a. Kerjasama antar lini (antara atasan dengan bawahan, pejabat fungsional Pelelang, dan antar Seksi/Subbagian di internal KPKNL) sangat mempengaruhi tercapainya target pada Seksi Pelayanan lelang;
- b. Dukungan sarana dan prasarana pada KPKNL Bekasi sangat menunjang kelancaran proses pencapaian target;
- c. Koordinasi dan kerjasama yang intensif, serta pelayanan prima kepada stakeholders pengguna jasa Lelang;
- d. Kondisi Pasar atau daya beli masyarakat yang rendah, barang yang kurang marketable dan limit yang tinggi merupakan beberapa alasan tidak tercapainya target/rencana seksi lelang.

Kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil antara lain:

- a. Memberikan sosialisasi dan publikasi terkait lelang kepada pengguna jasa lelang baik kepada pemohon maupun peminat lelang agar mereka mengenal serta memahami sistem penjualan secara lelang melalui aplikasi *e-auction* yang mempunyai banyak keunggulan dibanding sistem manual/dengan kehadiran;
- b. Melakukan penggalian potensi lelang baik terhadap instansi-instansi maupun lembaga yang memiliki potensi untuk menggunakan sistem lelang;

- c. Mengadakan *Focus Group Discussion* dengan para *stakeholder* pemohon lelang terkait penetapan nilai limit yang wajar dan peningkatan pemasaran terhadap objek lelang.
- d. Melakukan kunjungan langsung/pertemuan resmi dengan para *stakeholder* di wilayah kerja agar terjalin hubungan dan kerjasama yang lebih baik dalam pelayanan lelang.

5. Seksi Hukum dan Informasi

Pada seksi Hukum dan Informasi, hal yang mendukung tercapainya rencana/target atau alasan tidak tercapainya target sebagai berikut:

- a. Kerjasama antar lini (antara atasan dengan bawahan, maupun antar seksi) di internal KPKNL Bekasi sangat mempengaruhi tercapainya target pada Seksi Hukum dan Informasi;
- b. Dukungan sarana dan prasarana pada KPKNL Bekasi sangat menunjang kelancaran proses pencapaian target;

Kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil antara lain:

- a. Seksi Hukum dan Informasi berusaha meningkatkan kinerja dengan baik;
- b. Berkoordinasi dengan Subbagian Umum guna membiayai biaya-biaya atas pengambilan putusan perkara pengadilan; dan
- c. Berkoordinasi antar Seksi terutama seksi Pelayanan Lelang dan Piutang Negara untuk melakukan kerja sama terkait penanganan perkara pada KPKNL Bekasi.

6. Subbagian Umum

Berkenaan dengan efisiensi penggunaan Sumber Daya pada KPKNL Bekasi dalam rangka pembinaan dikepegawaian, berdasarkan data dan usulan ke Kantor Pusat per 31 Desember 2022, dapat disampaikan sebagai berikut:

- a. Kenaikan pangkat : 5 orang
- b. Kenaikan Gaji Berkala : 31 orang
- c. Pegawai pensiun : 2 orang
- d. Pegawai mengikuti diklat : 137 orang

7. Seksi Kepatuhan Internal

- a. Meningkatkan kompetensi SDM untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan/workshop;
- b. Internalisasi atas tugas dan fungsi Unit Kepatuhan Internal seperti contoh Manajemen Risiko, Pengendalian Internal, Pemantauan Gratifikasi, Pengelolaan Kinerja, dll.;
- c. Melakukan koordinasi dan diskusi dengan Bidang KIH Kanwil DJKN Jawa Barat dan Bagian OKI Kantor Pusat DJKN;
- d. Penambahan SDM pada Seksi Kepatuhan Internal.

D. Realisasi Anggaran

Tahun Anggaran 2022 KPKNL Bekasi mendapat alokasi anggaran sebesar Rp2.065.136.000,00 (Dua Miliar Enam Puluh Lima Juta Seratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah). Anggaran yang telah direalisasikan untuk mewujudkan kinerja organisasi KPKNL Bekasi berdasar Penyerapan Anggaran, Capaian Keluaran Riil, dan Capaian Efisiensi sebagai berikut:

1. Penyerapan Anggaran : Rp1.958.653.219,00
2. Capaian Keluaran Riil : 94,84%

E. Inovasi dan Prestasi Kerja

1. Inovasi

a. Inovasi dan Teknologi Informasi

KPKNL Bekasi mengikutsertakan dua inovasinya yaitu Sistem Informasi Manajemen Kinerja Utama (SIM-KU) dan Aplikasi Layanan Pasca Lelang (ALASCA) sebagai nominasi dalam Kompetisi Inovasi Kementerian Keuangan (KIKK) Tahun 2020, Pada tahun 2022, inovasi ini sedang dikembangkan agar dapat memenangkan kompetisi di tahun berikutnya. KPKNL Bekasi juga berhasil menjadi mentor bagi KPKNL Metro dalam meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada tahun 2022. Inovasi lain di mana KPKNL Bekasi memfasilitasi pembuatan permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) melalui Pojok SKPT.

b. Program Perubahan

Dalam rangka pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir dengan peraturan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, dibentuk Program Perubahan pada KPKNL Bekasi sebagai berikut:

1) Program Revitalisasi dan Penyempurnaan Area Pelayanan Terpadu (REPEAT)

Revitalisasi dan Penyempurnaan APT sebagai public face KPKNL Bekasi, yaitu image/wajah keseluruhan KPKNL Bekasi yang tercermin di depan stakeholder. APT merupakan salah satu titik awal dan akhir interaksi KPKNL Bekasi dengan stakeholder sehingga sangat penting untuk memberikan impresi yang baik. Program ini dinamakan REPEAT karena

aktivitas dan kegiatan di APT merupakan proses yang berulang. Proses ini seharusnya memberikan perbaikan dan peningkatan berkelanjutan (*continuous improvement*) menjadi lebih baik di setiap repetisinya.

Penerapan program REPEAT terdiri dari beberapa fokus utama sebagai berikut:

- a) Revitalisasi dan Penyempurnaan Sarana, Prasarana dan Fasilitas (REPEAT SARPRAS), yaitu pemenuhan dan peningkatan fasilitas fisik APT.
- b) Revitalisasi dan Penyempurnaan Sumber Daya Manusia (REPEAT SDM), yaitu pemenuhan dan peningkatan Sumber Daya Manusia APT.
- c) Revitalisasi dan Penyempurnaan Proses Bisnis (REPEAT SOP), yaitu pemenuhan dan peningkatan Proses Bisnis APT.

2) Program Monday Evaluation (MODEL)

Evaluasi merupakan implementasi dari Nilai Kementerian Keuangan yaitu Kesempurnaan. Dalam rangka menuju kesempurnaan, KPKNL Bekasi senantiasa melakukan *continues improvement* melalui evaluasi pada setiap aktivitas yang dilakukan. Monday Evaluation dilakukan setiap senin pagi sebagai evaluasi atas kegiatan dan aktivitas yang dilakukan seluruh elemen KPKNL Bekasi dalam periode seminggu sebelumnya.

3) Program Cengkrama Edukasi dan Idea (Rabu CENDEKIA)

Dalam rangka meningkatkan kompetensi pegawai KPKNL Bekasi, diperlukan sebuah wadah untuk berbagi pengetahuan, edukasi dan ide-ide pegawai. RABU CENDEKIA dijadwalkan rutin setiap Rabu untuk menambah kompetensi pegawai KPKNL Bekasi. Materi yang dibawakan tidak hanya meningkatkan pengetahuan teknis, tetapi juga *soft-skill* dan pengetahuan umum. Pegawai yang selesai melaksanakan diklat dijadwalkan untuk menjadi narasumber dalam RABU CENDEKIA. Sesekali waktu KPKNL Bekasi juga mendatangkan narasumber dari pihak yang berkompeten untuk menambah kualitas konten kegiatan ini.

4) Program Galang Semangat Pagi (GSP)

Kegiatan ini merupakan perwujudan budaya Kementerian Keuangan dalam waktu 15-20 menit. Dalam GSP tertuang komitmen dan disiplin pegawai KPKNL Bekasi dalam mengawali hari untuk mencapai tujuan organisasi. GSP diawali dengan pembukaan, pembacaan maklumat pelayanan bersamasama, *sharing* informasi singkat (*implementasi one day one information*) dan ditutup dengan *yel-yel* bersama. GSP dijadwalkan sebelum mulai jam layanan yaitu pada pukul 07.45 s.d 08.00 WIB bergantian setiap harinya sehingga seluruh pegawai KPKNL Bekasi

mendapatkan giliran untuk menyampaikan informasinya dan mendapatkan kesempatan untuk berbicara di depan publik (internal).

5) Program Sosialisasi, Interaksi dan Corporate Social Responsibility (LITERASI)

Selain menjalankan tugas dan fungsinya sebagai kantor pelayanan pemerintah sesuai dengan aturan yang berlaku, KPKNL Bekasi juga melakukan interaksi sosial sebagai bagian dari masyarakat. KPKNL Bekasi senantiasa berusaha memberikan kontribusi lebih di luar tugas dan fungsinya. Selama ini KPKNL Bekasi telah melaksanakan sosialisasi dan interaksi baik kepada stakeholder maupun kepada masyarakat secara umum. LITERASI merupakan wadah untuk mendokumentasikan dan public campaign kegiatan tersebut.

6) Program Informasi Kinerja (INFRA)

INFRA merupakan bentuk digitalisasi dalam penyampaian informasi kinerja KPKNL Bekasi. Sebagai satu organisasi, seluruh pegawai seharusnya mengetahui tidak hanya kinerja masing-masing pegawai/seksinya, tetapi juga kinerja KPKNL Bekasi secara keseluruhan.

Penyampaian dilakukan dalam bentuk infografis atau video yang menarik untuk dilihat dan dibaca. INFRA juga dibagikan kepada stakeholder dan masyarakat dalam bentuk digital melalui media sosial dan media lainnya.

7) Program Collaborated Auction (COLLABORAUCTION)

Lelang merupakan salah satu layanan unggulan pada KPKNL Bekasi, dengan target yang selalu meningkat dan challenging dari tahun ke tahun membuat KPKNL Bekasi membat terobosan dan ide-ide baru untuk mencapainya. COLLABORAUCTION merupakan salah satu upaya untuk mencapai target dan sasaran kinerja dengan melakukan sinergi bersama stakeholder untuk menyelenggarakan lelang skala besar. COLLABORAUCTION diharapkan dapat mendongkrak capaian lelang terutama pada capaian pokok lelang, bea lelang, dan frekuensi lelang laku.

c. Inovasi Prosedur dan Layanan

1) Pendekatan Kepada Pengguna Layanan Melalui *Whatsapp Care*

KPKNL Bekasi senantiasa berupaya untuk dekat dengan pengguna layanan melalui dibukanya kanal informasi berbasis aplikasi Whatsapp. Melalui aplikasi ini Pengguna layanan dilayani, melalui 2 (dua) metode, yaitu diskusi chat interaktif senin sampai dengan jumat pkl. 8.00 sampai dengan pkl 16.30, dan layanan jawab otomatis diluar jam layanan chat

interaktif sehingga *Whatsapp Care* melayani penuh selama 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu.

2) One Day One Service Penetapan Lelang

Khusus permohonan penjualan BMN, permohonan penetapan lelang akan ditetapkan 1 (satu) hari sejak surat penetapan lelang sejak dokumen lengkap diterima. Hal tersebut merupakan percepatan dari SOP Layanan Unggulan DJKN dengan norma waktu 2 (dua) hari.

3) One Day One Service Penetapan Status Pengguna BMN Berupa Tanah dan/atau Bangunan Khusus permohonan status penggunaan BMN berupa Tanah dan/atau Bangunan,

Surat Keputusan akan ditetapkan 1 (satu) hari sejak dokumen lengkap.

4) Sinergi Pelayanan Persetujuan Penjualan BMN Dengan Pelayanan Lelang

Sinergi pelayanan dimaksud dalam hal kelengkapan dokumen permohonan lelang BMN yang harus dilampirkan oleh satuan kerja pemohon lelang. Dalam hal ini, satuan kerja tidak perlu melampirkan kembali surat persetujuan Penjualan BMN ketika mengajukan permohonan lelang. Layanan ini berlaku untuk surat persetujuan penjualan BMN yang diterbitkan KPKNL Bekasi.

5) Penetapan Prosedur di Area Pelayanan Terpadu (REPEAT)

Area Pelayanan Terpadu sebagai public face KPKNL Bekasi, adalah cerminan wajah keseluruhan KPKNL Bekasi di depan stakeholder. APT disebut sebagai salah satu titik awal dan akhir interaksi KPKNL Bekasi dengan stakeholder sehingga sangat penting untuk memberikan impresi yang baik. Oleh sebab itu, perlu untuk selalu dibenahi sebagai tindak lanjut survey dan peningkatan kepuasan pengguna layanan dengan Program "Revitalisasi dan Penyempurnaan APT atau disingkat REPEAT". Penerapan program REPEAT terdiri dari beberapa fokus utama sebagai berikut:

- a) Revitalisasi dan Penyempurnaan Sarana, Prasarana dan Fasilitas (REPEAT SARPRAS), yaitu pemenuhan dan peningkatan fasilitas fisik APT.
- b) Revitalisasi dan Penyempurnaan Sumber Daya Manusia (REPEAT SDM), yaitu pemenuhan dan peningkatan Sumber Daya Manusia APT.
- c) Revitalisasi dan Penyempurnaan Proses Bisnis (REPEAT SOP), yaitu pemenuhan dan peningkatan Proses Bisnis APT.

2. Prestasi dan Penghargaan

Prestasi yang pernah diraih oleh KPKNL Bekasi:

- a. Penghargaan sebagai Unit Kerja Pelayanan Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2018);
- b. Penghargaan sebagai Unit Kerja Pelayanan Berpredikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2021);
- c. Pejabat Lelang Kelas I Terbaik Ketiga Tahun 2017 dan 2019. (DJKN, 2018 & 2020);
- d. Juara 3 Kompetisi Pengelolaan BMN di Lingkungan Kementerian Keuangan (Kementerian Keuangan, 2020);
- e. Partisipasi dalam Kegiatan Lelang UMKM Tahun 2021 (Direktorat Lelang DJKN, 2021);
- f. Satker dengan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Terbaik Kategori Penyampaian LPJ Penerimaan Terbaik Periode Semester I TA 2022 (KPPN Bekasi, 2022);
- g. Satker dengan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Terbaik Kategori penyampaian Saldo Rekening Pemerintah Terbaik Periode Semester I TA 2022 (KPPN Bekasi, 2022);
- h. Juara 4 Lomba Cerdas Cermat dalam Rangkaian Kegiatan Carnival Penilaian 2022;
- i. Juara I Tenis Meja Ganda Putra bersama KPKNL Tangerang II sebagai Perwakilan Kantor Pusat DJKN dalam Hari Oeang ke 76 Tahun 2022;
- j. Untuk tahun 2022, Capaian Nilai Kerja Organisasi (NKO) sebesar 113,42, Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja sebesar 97,17, sedangkan Nilai Reviu Pengendalian Intern sebesar 99,42.

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan hal-hal yang sudah diuraikan di atas bisa ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan kinerja KPKNL Bekasi secara umum pada Tahun Anggaran 2022 adalah sangat baik. Sebagian besar target yang telah ditetapkan berdasar Indeks Kinerja Utama (IKU) sesuai Kontrak Kinerja Kepala Kantor bisa tercapai dengan baik kecuali IKU Persentase Pemenuhan *Standar Hard Competency*. Adapun Nilai Kinerja Organisasi (NKO) per 31 Desember 2022 tercapai sebesar 113,42%.

Di samping itu, KPKNL Bekasi sebagai Kantor Pelayanan Percontohan peringkat II tingkat Kementerian Keuangan Tahun 2016 dan peraih predikat Wilayah Bebas Korupsi tahun 2018, serta peraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani tahun 2020, tetap mempertahankan pelayanan prima yang bebas korupsi kepada stakeholder. KPKNL Bekasi terus berusaha melaksanakan upaya perbaikan diri dari sisi pelayanan melalui pengembangan inovasi teknologi yang memudahkan tugas tugas sehari-hari. Hal ini menjadi bukti bahwa KPKNL Bekasi belum berpuas diri atas capaian yang sudah ada.

Diharapkan dengan capaian kinerja yang sangat memuaskan dan prestasi yang telah dicapai maupun yang ingin diraih tersebut, menjadi motivasi bagi segenap pegawai baik ditingkatan pelaksana sampai pimpinan untuk terus berusaha meningkatkan kinerja yang lebih baik lagi. Kedepan KPKNL Bekasi akan mempertahankan predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) sebagai bukti keseriusan KPKNL Bekasi untuk terus bertransformasi dalam menjaga kualitas dan meningkatkan pelayanan.